



SUARA-SUARA LOKAL UNTUK REFORMASI KEMANUSIAAN: RANGKAIAN CATATAN SINGKAT DARI INDONESIA

SEPTEMBER 2021

TENTANG RANGKAIAN INI

Rangkaian Catatan Singkat seputar reformasi kemanusiaan ini disusun sebagai bagian dari aliran pengkajian *Building a Blueprint for Change* yang merupakan bagian dari program pengkajian *Humanitarian Horizons*. Pengkajian ini dilakukan oleh Humanitarian Advisory Group (HAG) dan Pujiono Center dengan didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (*Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT*).

Pengkajian Blueprint berusaha memberikan dasar bukti untuk memajukan perubahan transformatif dalam sistem kemanusiaan di tingkat negara, dengan fokus pada Indonesia. Pengkajian ini menyelidiki kondisi lokal dan faktor-faktor pendorong reformasi untuk mengusulkan visi ke depan dengan mengkaji

hubungan dan perbedaan antara prioritas Indonesia dan agenda reformasi global.

Pada Fase 1 pengkajian ini dilakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi empat bidang prioritas reformasi di Indonesia: koordinasi, akuntabilitas, penguatan kapasitas, dan pendanaan.¹ Pada Fase 2 pengkajian ini diungkapkan bahwa keberhasilan reformasi kemanusiaan di keempat bidang ini sangat bergantung pada siapa yang diikutsertakan dan dikecualikan dalam upaya reformasi. Pengkajian menunjukkan bahwa pelaku lokal di Indonesia jarang dilibatkan dalam debat seputar reformasi dan forum pengambilan keputusan, bahkan pelaku informal yang kritis sering diabaikan.

¹ Untuk informasi lebih lanjut tentang fase 1 penelitian Cetak Biru, silakan lihat: HAG, 2020, [Building a Blueprint for Change: Laying the Foundations](#).

Untuk membantu mengangkat suara-suara lokal dan nasional ke dalam diskusi seputar reformasi yang sedang berlangsung di tingkat nasional dan internasional, pengkajian Blueprint menjangkau empat mitra kemanusiaan utama di Indonesia untuk memberikan wawasan dasar tentang prioritas, pelajaran, dan peluang untuk perubahan yang berarti di Indonesia. Setiap mitra diberikan pertanyaan yang relevan sesuai dengan proyek Blueprint, tetapi pada akhirnya isi dari setiap catatan singkat ini ditentukan oleh masing-masing organisasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya yang spesifik.

Hasil diskusi dari masing-masing organisasi disunting oleh HAG dan Pujiono Center untuk memberikan kejelasan dan konsistensi bagi Rangkaian Catatan Singkat ini. Rangkaian ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Catatan singkat ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laporan akhir untuk proyek Blueprint (akan datang) dan akan diangkat sebagai alat advokasi untuk upaya reformasi kemanusiaan di Indonesia.

Tentang mitra

Humanitarian Forum Indonesia (HFI)

HFI adalah konsorsium dari 15 organisasi keagamaan nasional dan internasional di Indonesia yang berkomitmen untuk meningkatkan hubungan antara pelaku kemanusiaan dan masyarakat. Jaringan ini berusaha untuk memperkuat peningkatan kapasitas, koordinasi dan kemitraan di antara para pelaku kemanusiaan. HFI bekerja di dalam ruang lingkup advokasi untuk mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan, pelaksanaan program kemanusiaan dan pengembangan sistem komunikasi dan manajemen informasi.

Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK)

JMK merupakan konsorsium dari 23 organisasi lokal dan nasional yang didukung oleh Oxfam Indonesia. Konsorsium ini didirikan pada tahun 2017 sebagai upaya berbagi ilmu antar mitra lokal Oxfam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Semua mitra JMK awalnya adalah LSM pembangunan yang telah dilatih keterampilan dan kompetensi kemanusiaan. Konsorsium ini memiliki jaringan besar di seluruh Indonesia dan telah mengembangkan pendekatan klasternya sendiri untuk menyampaikan program pembangunan dan kemanusiaan yang sepenuhnya dikelola secara lokal.

Palang Merah Indonesia (PMI)

PMI adalah anggota dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent - IFRC). Organisasi ini memelihara jaringan sukarelawan yang kuat dan keahlian berbasis komunitas dalam pekerjaan kemanusiaan. Sebagai Perhimpunan Nasional, PMI berusaha untuk meningkatkan standar kemanusiaan, bekerja sebagai mitra dalam pembangunan, menanggapi bencana, mendukung masyarakat yang lebih sehat dan lebih aman, serta mengurangi kerentanan untuk memperkuat ketahanan.

Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC)

PMI adalah anggota dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent - IFRC). Organisasi ini memelihara jaringan sukarelawan yang kuat dan keahlian berbasis komunitas dalam pekerjaan kemanusiaan. Sebagai Perhimpunan Nasional, PMI berusaha untuk meningkatkan standar kemanusiaan, bekerja sebagai mitra dalam pembangunan, menanggapi bencana, mendukung masyarakat yang lebih sehat dan lebih aman, serta mengurangi kerentanan untuk memperkuat ketahanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Humanitarian Advisory Group ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada Rangkaian Catatan Singkat ini, diantaranya yaitu Surya Rahman Muhammad dan Ali Yusuf dari HFI, Haris Oematan dari JMK, Arifin Muh Hadi dari PMI, Arif Nur Kholis dan Rahmawati Husein dari MDMC, serta Puji Pujiono, Dio Fikri Aditama, Putu Hendra Wijaya dan Disya Marianty dari Pujiono Center. HAG ingin mengapresiasi mitra-mitra kami yang pada saat pengkajian ini disusun bekerja di Indonesia dalam kondisi sulit akibat kerusakan dan kerugian besar dari memuncaknya efek pandemi.

Foto sampul: Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Devon Daniel, Unsplash



BRIEFING REFORMASI KEMANUSIAAN: KOORDINASI

Koordinasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan isu-isu bencana dan kemanusiaan di Indonesia. Meskipun kapasitas koordinasi di tingkat nasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, ada kebutuhan akan kontribusi yang lebih efektif dari platform koordinasi dan mitra di tingkat lokal. Untuk mencapai perubahan transformatif diperlukan peningkatan koordinasi sebagai bidang praktik khusus, bukan hanya sebagai issue lintas sektoral, dan dituntut investasi serius dari pemangku kepentingan utama.

Catatan singkat ini merefleksikan struktur, kekuatan dan kelemahan saat ini dalam koordinasi kemanusiaan di Indonesia, dan mengidentifikasi peluang untuk reformasi. Catatan ini dikembangkan oleh Surya Rahman Muhammad, Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia.

KONDISI TERKINI

Undang-undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 menetapkan instansi tingkat nasional, provinsi dan kotamadya/kota untuk mengkoordinasikan respons darurat. Meskipun demikian, pejabat pemerintah daerah memiliki kapasitas koordinasi yang berbeda-beda dan beberapa di antara mereka tidak sepenuhnya menyadari mandat, wewenang dan prosedur operasi standar (*standard operating procedures* - SOP) yang perlu diterapkan pada saat krisis.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi 'pendekatan klaster' dengan dukungan dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UN OCHA). Instansi pemerintah, badan-badan PBB dan LSM internasional bekerja sama dengan baik di dalam klaster. Namun, tingkat komitmen berbagai kementerian dan lembaga sektoral yang memimpin tidak selalu sama, sehingga menghambat fungsi klaster. Ditengarai adanya kesenjangan bantuan di lokasi yang sulit diakses; untuk memastikan bahwa semua yang membutuhkan menerima bantuan sesuai dengan prioritas keseluruhan, maka kesenjangan bantuan harus diisi dan duplikasi dikurangi.

Dalam krisis skala menengah hingga besar, terutama ketika perespons lokal juga terdampak, sistem koordinasi lokal memerlukan bantuan dari tataran nasional dan, dalam banyak kasus, dari organisasi masyarakat sipil (OMS). Ada peluang untuk memperkuat koordinasi, termasuk mengoptimalkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

sipil, mendorong rasa memiliki organisasi lokal atas koordinasi lokal, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam rapat koordinasi selama respons bencana besar. Kemungkinan lain termasuk memperkuat manajemen informasi, meningkatkan pemahaman tentang prosedur, dan berinvestasi dalam koordinasi sebagai kompetensi yang berdiri sendiri.

Model koordinasi yang ada di Indonesia

Kepemimpinan Pemerintah: Model koordinasi yang dipimpin pemerintah didasarkan pada komando dan kendali. Pengalaman menunjukkan bagaimana koordinasi seringkali terfragmentasi, dengan kesenjangan yang terus-menerus antara tingkat nasional dan lokal. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Indonesia membentuk Posko Komando Terpadu dengan dukungan dari militer, bersama dengan Pos Pendamping Nasional untuk mendukung operasi respons lokal. Sebelumnya, hubungan antara dua badan ad hoc nasional dan pemerintah daerah di lokasi respons darurat tidak jelas.

Berbasis sektoral atau lokal: Respons bencana di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat baru-baru ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), OMS dan elemen lainnya terjadi melalui pendekatan klaster dan sub klaster. Sistem klaster berarti beberapa kebijakan menjadi lebih mudah diimplementasikan, meskipun terkadang keputusan dalam koordinasi klaster terhambat oleh kebijakan nasional.

Kepemimpinan Bersama Pemerintah dan OMS/LSM: Dalam respons Sulawesi Tengah, tim OMS/LSM dikerahkan untuk memulai, membangun dan memfasilitasi koordinasi lokal untuk memungkinkan koordinasi konvensional pemerintah daerah menjadi lebih selaras dengan respons kemanusiaan.

PRIORITAS UNTUK Penguatan Koordinasi Kemanusiaan

- 1. Memperkuat kapaistas koordinasi respons lokal.** Kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang praktik koordinasi standar diperlukan untuk memastikan bahwa pejabat yang diberi mandat di pemerintah daerah mengetahui bagaimana dan kapan menjalankan kewenangan koordinasi mereka. Pejabat badan koordinasi pemerintah harus mampu melakukan koordinasi sebagai fungsi pemecahan masalah bukan hanya sebagai kegiatan rutin. Mekanisme koordinasi lokal yang didefinisikan secara sempit saat ini membatasi potensi OMS/LSM untuk memperluas dan mengangkat isu ke platform nasional mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik pemerintah.
- 2. Meningkatkan koordinasi respons sebagai kompetensi yang berdiri sendiri.** Pelaku kemanusiaan yang memimpin dan berpartisipasi dalam koordinasi lokal harus memiliki kompetensi koordinasi yang memadai. Jika tidak ada, koordinasi lokal sebagian besar hanya berupa pertukaran informasi tentang kegiatan masing-masing lembaga yang telah selesai atau direncanakan. Kebutuhan darurat, tantangan, dan peluang-peluang tidak dapat disampaikan melalui kolaborasi dan perencanaan strategis kolektif jika para peserta tidak memiliki pemahaman penuh tentang koordinasi. Beberapa di antara mereka menghadiri rapat koordinasi tanpa memiliki informasi atau wewenang yang cukup, dan

beberapa mengalami pergantian sebelum sempat berkontribusi pada operasi tanggap darurat. Beberapa organisasi menggabungkan fungsi koordinasi dengan pelaksanaan lapangan, yang menimbulkan masalah dalam hal waktu, sumber daya dan komunikasi yang efektif. Koordinasi harus diakui dan bahkan diakreditasi sebagai kompetensi berdiri sendiri, bukannya diperlakukan sebagai tema lintas sektor yang seringkali 'nggak nendang'.

- 3. Menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan koordinasi.** Donor dan organisasi yang melakukan koordinasi perlu berinvestasi dalam koordinasi. Investasi ini bisa melalui tim yang mengkhususkan diri dalam koordinasi, alokasi dana khusus untuk koordinasi, dan sumber daya pelengkap untuk memastikan penerapan koordinasi lokal yang sesuai dengan budaya. Misalnya, biaya penyediaan jajanan kecil pada rapat koordinasi jarang tercakup dalam anggaran program, padahal ini merupakan bentuk komunikasi budaya Indonesia.

Ada juga peluang untuk mendanai atau mencari dukungan untuk memobilisasi bantuan kapasitas koordinasi dari organisasi nasional yang besar selama krisis. Ini dapat dilakukan, misalnya, dengan mengikuti model RedR Australia dengan menggunakan personel yang dilatih oleh staf Pemerintah Indonesia atau UN OCHA.

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERUBAHAN SISTEMIK

Koordinasi melibatkan pengetahuan dan keterampilan kritis, seperti fasilitasi, mediasi, manajemen konflik, keterampilan interpersonal, manajemen informasi, manajemen sumber daya manusia, dan pengetahuan konteks. Khususnya dalam krisis skala besar dan jangka panjang seperti pandemi COVID-19, koordinasi membutuhkan keterampilan khusus yang berbeda dari fungsi lain, seperti peran komando atau manajemen bencana. Beberapa langkah menuju promosi perbaikan sistemik dalam koordinasi kemanusiaan di Indonesia tercantum di bawah ini.

- ▶ **Meningkatkan ekspektasi pelatihan dan kualifikasi untuk para koordinator.** Kompetensi dan kecakapan koordinasi memerlukan pendekatan dan metode khusus, serta aplikasi praktis. Kompetensi tersebut membutuhkan pengembangan profesional berkelanjutan.
- ▶ **Mengembangkan prosedur standar.** Saat ini tidak ada literatur referensi standar untuk koordinasi. Banyak manajer koordinasi menjalankan fungsi mereka berdasarkan interpretasi dan pengalaman, yang mungkin sulit disampaikan secara informal.

- ▶ **Mengakui OMS/LSM sebagai peserta yang sah dalam platform koordinasi.** Tata kelola kolaboratif dan pendekatan pentahelix Pemerintah Indonesia membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang kemanusiaan.
- ▶ **Memperkuat pemerintah daerah.** Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas untuk membedakan koordinasi dari fungsi komando, dan mengembangkan model koordinasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah pusat harus melaksanakan program untuk memperkuat kapasitas koordinasi pemerintah daerah.
- ▶ **Menghidupkan kembali platform koordinasi lokal.** Platform lokal yang melibatkan berbagai unsur, contohnya seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), merupakan pendekatan yang cocok secara budaya untuk melakukan koordinasi. Rancangan kebijakan BNPB tentang penetapan FPRB sebagai mitra strategis pemerintah daerah perlu diselesaikan, dan membolehkan mereka untuk segera difungsikan untuk koordinasi tanggap darurat bila diperlukan.
- ▶ **Meningkatkan konsistensi dari kebijakan nasional dan lokal.** Koordinasi yang lebih baik membutuhkan konsistensi kebijakan pemerintah di bidang koordinasi, terutama yang melibatkan pelaku kemanusiaan. SOP yang tepat untuk koordinasi akan membantu mendorong konsistensi dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi berbasis wilayah: model yang cocok untuk Indonesia?

Koordinasi berbasis wilayah didasarkan pada gagasan bahwa koordinasi menjadi lebih kuat ketika kegiatan diorganisir berdasarkan wilayah geografis daripada berdasarkan sektor. Menurut [Center for Global Development](#), pendekatan berbasis wilayah ‘memperlakukan kebutuhan secara holistik dalam komunitas atau geografi yang ditentukan; memberikan bantuan yang secara eksplisit bersifat multisektor dan multidisiplin; dan merancang dan mengimplementasikan bantuan melalui pelibatan partisipatif tokoh masyarakat dan komunitas terdampak.’

Di Indonesia, model koordinasi berbasis wilayah perlu diuji dengan modifikasi. Salah satunya adalah pendekatan membangun koordinasi multi-sektor tataran akar rumput oleh pelaku lokal, sebagai kebalikan dari pendekatan perpanjangan tangan yang secara tradisional sudah ada pada sistem kemanusiaan internasional. Uji coba model ini dapat menjawab apakah daerah dapat mempunyai koordinasi yang lebih baik meskipun karakteristik dan politik lokal mereka berbeda-beda. Pendekatan koordinasi berbasis wilayah dapat meningkatkan koordinasi kemanusiaan melalui:

- ▶ Peningkatan pemahaman dan analisis masalah politik dan sosial budaya lokal
- ▶ Keterlibatan lebih banyak tokoh lokal kunci
- ▶ Memperkuat investasi kapasitas dan mendorong kebijakan di tingkat lokal
- ▶ Pengembangan respons kemanusiaan yang mencakup *exit strategy*.

Penulis: Surya Rahman Muhammad, Humanitarian Forum Indonesia

Dukungan: Humanitarian Advisory Group dan Pujiono Centre

Penyunting: Campbell Aitken & Pujiono

Desain: Jean Watson

Penerjemah: Dio Fikri Aditama & Putu Hendra Wijaya



BRIEFING REFORMASI KEMANUSIAAN: AKUNTABILITAS

Pengalaman di Indonesia seperti juga di tempat lain, menunjukkan lemahnya akuntabilitas kepada komunitas terdampak (accountability to affected populations - AAP). Singkatnya, komunitas terdampak jarang terlibat, atau hanya secara minim, dalam pelaksanaan bantuan yang mereka terima. Terkadang tidak diberi kesempatan memberikan masukan; terkadang memberikan masukan atau umpan balik, tetapi tidak diambil tindakan; terkadang ditindaklanjuti oleh beberapa organisasi, tetapi sebagian lain tidak berubah perilakunya.

Komunitas terdampak dipandang sebagai korban dan rentan, dan diposisikan sebagai penerima bantuan. Tanpa keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan, respons kemanusiaan rentan gagal mencapai target, melakukan intervensi tidak tepat, hubungan tidak harmonis, krisis kepercayaan, duplikasi bantuan, inkonsistensi, dan kurang keberlanjutan dan meninggalkan masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh komunitas.

Catatan singkat ini merefleksikan peluang-peluang untuk memperkuat AAP di Indonesia melalui investasi yang lebih besar dan lebih sensitif secara kontekstual, serta terwujudnya pemahaman bersama. Catatan ini dikembangkan oleh Harris Oematan dari Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK).

ELEMEN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas, prinsip penting dalam aksi kemanusiaan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas respons dan kepercayaan, serta mewujudkan kesetaraan hubungan antara donor, pemerintah, organisasi atau jaringan internal, dan komunitas yang terdampak. Ini mengacu pada tiga elemen kunci:

- ▶ **Kualitas respons** – kepatuhan terhadap standar-standar pelaksanaan program, pengelolaan keuangan, dan pengadaan, sebagaimana diverifikasi melalui pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan dokumen pembelajaran
- ▶ **Kepercayaan** – tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dan komunitas terdampak, yang dibangun melalui kunjungan ke lapangan, pertemuan dialog, dan tanggapan yang tepat terhadap masukan dan umpan balik

- ▶ **Kesetaraan** – penghormatan timbal balik tanpa dominasi dan diskriminasi, di antara donor, manajemen, staf, dan komunitas terdampak, atau bentuk diskriminasi lain berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Bentuk akuntabilitas tertinggi adalah akuntabilitas kepada komunitas sasaran. Komponen-komponen yang vital adalah mendengarkan, memahami, dan bertindak berdasarkan kepedulian dan kebutuhan, dalam pengkajian, sosialisasi, implementasi, dan pemulihan.

Akuntabilitas dalam berbagai organisasi

Saat ini, pemahaman mengenai akuntabilitas kemanusiaan di Indonesia masih terbatas. Pembentukan Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan komunitas, membawa kemajuan dalam membuka dialog dan umpan balik yang berarti dengan komunitas terdampak. Namun, pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, dan organisasi keagamaan, serta organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan internasional, memegang pandangan dan pendekatan yang berbeda-beda mengenai akuntabilitas, sehingga menimbulkan kebingungan. Akuntabilitas umumnya dipahami sebatas keuangan dan prosedural kepada pendonor, hal ini membuat banyak organisasi lokal lebih cemas terkait audit, dibanding persepsi komunitas mengenai pekerjaan mereka.

Pelaku kemanusiaan lokal dan internasional memiliki pemahaman dan model akuntabilitas yang berbeda. Secara umum, pelaku kemanusiaan lokal fokus pada respons cepat, sehingga komunitas terdampak dapat segera dibantu tanpa harus melalui proses birokrasi dan administrasi yang rumit. Pengambilan keputusan yang disederhanakan ini menyebabkan pelaku kemanusiaan lokal seringkali efektif dalam respons awal dan sangat kuat dalam koordinasi dan penerimaan dan tingkat kepercayaan komunitas, tetapi lemah dalam akuntabilitas keuangan dan administratif. Sementara pelaku kemanusiaan internasional cenderung lebih mematuhi peraturan keorganisasian formal, dan konsekuensinya, proses respons mereka cenderung tertunda dibandingkan dengan pelaku kemanusiaan lokal.

MEMPERKUAT AKUNTABILITAS KEPADA KOMUNITAS TERDAMPAK

Akuntabilitas kepada komunitas terdampak harus diprioritaskan; namun jalan kesannya tidak jelas. Inisiatif-inisiatif internasional yang dirancang untuk meningkatkan AAP, sebagian besar belum diterjemahkan pada konteks Indonesia. Beberapa isu yang perlu dipertimbangkan kearah peningkatan AAP tercantum di bawah ini.

Mengangkat suara samar dari komunitas terdampak. Komunitas terdampak di Indonesia, cenderung pemalu. Dibantu saja mereka sudah bersyukur, maka mereka jarang menuntut atau mengeluh. Pengkajian kebutuhan yang hanya mengandalkan mekanisme formal pemerintah daerah kemungkinan besar mengabaikan suara-suara samar ini dan mengakibatkan penyediaan bantuan dan pelaksanaan program yang melenceng, tidak sesuai, dan tidak memadai.

Membangun akuntabilitas harus diprioritaskan sebagai investasi. Organisasi-organisasi lokal seringkali terlalu mengandalkan kedekatan mereka dengan komunitas terdampak dan oleh karenanya tidak mengalokasikan dana untuk AAP dalam proposal-proposal program mereka. Akibatnya, ada risiko program mereka salah sasaran, sumberdaya tersia-sia, dan lebih buruk lagi, justru mencederai atau merugikan komunitas.

Kepemimpinan komunitas mungkin punya prioritas sendiri-sendiri. Meski sebagian besar pemimpin lokal dapat dipercaya untuk membela kepentingan komunitas mereka, ada beberapa pengecualian. Contohnya, model-model kepemimpinan berikut:

- ▶ **Pemimpin mata duitan** berorientasi uang dan menysasar organisasi-organisasi kemanusiaan yang besar demi mendapatkan keuntungan finansial dan, dan sebaliknya, membatasi akses organisasi yang lokal dan kecil
- ▶ **Pemimpin egois** melayani diri sendiri dengan mengarahkan organisasi bantuan lokal untuk mengalokasikan bantuan kepada komunitas tertentu yang bukannya terdampak terparah, menciptakan kecemburuan sosial, ketidakpercayaan, dan penolakan
- ▶ **Pemimpin buta inklusivitas** Dalam komunitas patrilineal yang kuat, para pemimpin biasanya buta gender dan abai pentingnya inklusivitas. Ini bisa dilihat dari komposisi panitia / kelompok kerja, peserta rapat, dan alokasi bantuan.

Kurang keterlibatan kelompok rentan. Kelompok rentan – seperti perempuan, anak-anak, Lansia, wanita hamil, pemuda, dan penyandang disabilitas – diposisikan sebagai objek dalam rencana dan umumnya tidak dilibatkan dalam konsultasi dengan pemimpin lokal. Dalam kondisi normal, tingkat partisipasi kelompok rentan ii biasanya sudah kurang memadai; ketika bencana terjadi, suara kelompok rentan menjadi lebih samar dan bahkan mungkin menghilang.

Perbedaan pendekatan antara organisasi kemanusiaan dan organisasi pembangunan Perespon lokal, terutama yang bukan dari latar belakang kemanusiaan, menganggap AAP terjadi dengan sendirinya dan oleh karenanya tidak selalu mementingkan konsultasi dengan komunitas terdampak dalam pengambilan keputusan sejak tahap awal respons.

Tingkat dukungan yang tidak konsisten. Penanggap lokal umumnya memberikan bantuan kemanusiaan hanya selama tanggap darurat, misalnya, dalam dua minggu atau satu bulan sejak kejadian, dan bersama itu AAP ikut surut. Tanggapan yang lebih lengkap biasanya dilakukan oleh kemitraan LSM internasional dan lokal, tergantung pada komitmen dan ketersediaan anggaran. Terkadang bantuan melimpah, dan di lain waktu justru tidak ada sama sekali.

Akuntabilitas belum menjadi bagian dari budaya organisasi. Organisasi kemanusiaan lokal berfokus untuk membantu komunitas terdampak untuk menjadi ‘aman dan baik-baik saja’. Dampak pendampingan terhadap kehidupan dan ketangguhan kurang diperhatikan, sehingga pemantauan dan evaluasi belum menjadi bagian dari budaya organisasi. Hanya beberapa organisasi kemanusiaan lokal yang memiliki kebijakan, struktur, mekanisme, dan sumber daya, serta personil khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pembelajaran (MEAL).

MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA MENGENAI AKUNTABILITAS DI INDONESIA

Diperlukan konsep tentang akuntabilitas yang jelas, relevan secara kontekstual, dan mudah dipahami dan dimiliki oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Konsep ini bisa diadaptasi dari Standar Kemanusiaan Inti (*Core Humanitarian Standard - CHS*). Konsep tersebut harus mampu mendorong upaya-upaya yang menjadi masukan dalam pengambilan keputusan di tingkat paling senior dan memberikan fokus untuk membawa hasil terbaik bagi komunitas terdampak. Ini perlu dimasukkan ke dalam segala prakarsa reformasi yang mengarah pada koordinasi, pendanaan, dan kapasitas. Tindakan berikut dapat membantu mencapai tujuan ini.

- ▶ **Berinvestasi dalam hal kapasitas terkait akuntabilitas tingkat lokal.** Organisasi nasional dan lokal perlu menginvestasikan energi dan sumber daya untuk memperkuat kapasitas para pelaku kemanusiaan lokal dalam menerapkan nilai-nilai dan kode etik terkait akuntabilitas untuk pendanaan dan pelaksanaan program.
- ▶ **Meningkatkan akuntabilitas.** Pastikan bahwa AAP menjadi kriteria utama dalam kemitraan lokal dan internasional serta menjadi topik utama dalam pengenalan program. Rancang dan sebarluaskan indikator akuntabilitas kepada komunitas, sehingga dapat dipahami dan dicapai oleh semua tim proyek.
- ▶ **Menerapkan mekanisme umpan balik.** Organisasi kemanusiaan harus menerapkan mekanisme umpan balik dan mendorong komunitas terdampak untuk menggunakannya dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, dan memberikan masukan. Mekanisme seperti itu harus dirancang pada tahap awal proyek, seperti pada tahap penulisan proposal. (Lihat di bawah untuk ringkasan mekanisme umpan balik JMK)
- ▶ **Libatkan kelompok rentan secara menyeluruh.** Untuk memastikan bahwa kelompok rentan berpartisipasi dan menjadi prioritas penerima bantuan, masukan mereka diperlukan dalam segala hal mulai dari pendataan hingga pendistribusian bantuan. Hal ini dapat menyeimbangkan banyaknya prioritas seperti dari sudut pandang pejabat pemerintah. Misalnya, JMK memulai dengan membentuk forum kelompok rentan di desa binaan untuk mendapatkan saran mengenai distribusi bantuan air bersih, sanitasi, dan

kebersihan, penguatan mata pencaharian, dan bantuan sembako di masa pandemi COVID-19.

- ▶ **Membuat platform akuntabilitas dalam sistem klaster.** Semua lembaga yang berperan dalam hal akuntabilitas, seperti inspektorat, badan pengawas dan peradilan, komunitas audit, dan praktisi pemantauan dan evaluasi, dapat berkontribusi pada AAP di dalam Klaster. Mereka dapat menyusun strategi metode dan pendekatan yang tepat untuk diterapkan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menyediakan jalur untuk pengaduan dan kebutuhan komunitas, agar dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Rangkuman mekanisme umpan balik JMK

Penanganan aduan dan umpan balik sangat penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas JMK. Organisasi ini telah mengembangkan dan sharing sistem penanganan aduan dan umpan balik berdasarkan pada program yang telah dijalankan sebelumnya oleh Oxfam.

Umpan balik komunitas didapatkan dari berbagai saluran atau forum, seperti diskusi kelompok terfokus; SMS, telepon, hotline WhatsApp; diskusi tatap muka dengan staf JMK; meja bantuan (Helpdesk); atau menggunakan formulir umpan balik, dan kotak saran. Saluran-saluran ini memungkinkan tingkat anonimitas dan kerahasiaan yang beragam. Formulir umpan balik memungkinkan pelapor untuk memberikan umpan balik positif, permintaan bantuan, dan ketidakpuasan ringan maupun ketidakpuasan berat. Individu bisa memilih untuk menyimpan catatan umpan balik mereka ke JMK.

Tim MEAL/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) JMK mengkategorikan umpan balik yang datang melalui berbagai saluran dan merujuknya ke tim teknis atau sektor terkait. Tim MEAL/TIK memantau kemajuan dalam menanggapi laporan-laporan. Kasus-kasus terkait pelanggaran kode etik dan perilaku ditangani secara terpisah oleh pengelola program, para pimpinan konsorsium, dan perwakilan donor.

Penulis: Harris Oematan, Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK)

Dukungan: Humanitarian Advisory Group dan Pujiono Centre

Penyunting: Campbell Aitken & Pujiono

Desain: Jean Watson

Penerjemah: Dio Fikri Aditama & Putu Hendra Wijaya



BRIEFING REFORMASI KEMANUSIAAN: KAPASITAS

Penelitian mengenai pelokalan menggarisbawahi perlunya organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bekerja di dalam kemitraan agar dapat memperkuat peran mereka sebagai perantara antara donor dan pelaku kemanusiaan lokal dalam rangka meningkatkan pengembangan dan dukungan kapasitas. Organisasi-organisasi perantara – termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah (LSM) internasional dan nasional – tidak selalu mempunyai cara terbaik untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan bagi organisasi-organisasi lokal yang kecil-kecil. Hal ini dapat dicapai oleh lembaga internasional dan nasional dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jaringan kluster layanan dan jaringan LSM

untuk memperkuat kapasitas organisasi-organisasi lokal yang kecil-kecil.

Catatan singkat ini merefleksikan berbagai peluang untuk memperkuat kapasitas respon kemanusiaan lokal di Indonesia, dengan memberikan sorotan terhadap pengalaman-pengalaman Palang Merah Indonesia (PMI). Catatan ini dikembangkan oleh Arifin Muh Hadi, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI, untuk proyek Building a Blueprint for Change dalam program pengkajian Humanitarian Horizons oleh Humanitarian Advisory Group. Sudut pandang di dalam catatan singkat ini memberikan informasi tambahan bagi laporan akhir proyek Blueprint..

KONDISI TERKINI

Selama respons bencana di Sulawesi Tengah pada September 2018, Pemerintah Indonesia bertindak cepat mengambil kepemimpinan serta membatasi kehadiran dan peran pelaku kemanusiaan internasional kecuali ditentukan oleh kebutuhan di lapangan dan adanya kemitraan yang sudah ada sebelumnya dengan organisasi lokal. Tanpa akses langsung ke lapangan, LSM internasional dipaksa bekerja dari jarak jauh dan secara eksklusif melalui mitra lokal. Hal ini menghasilkan model kemitraan yang inovatif dan peningkatan fokus pada pembangunan kapasitas mitra lokal. Organisasi lokal tidak lagi dilihat hanya sebagai sub kontraktor dan pelaksana, tetapi sebagai mitra yang berharga dalam pemberian bantuan. Pelajaran berharga dari respon Sulawesi Tengah adalah bahwa pelaku

kemanusiaan lokal harus memiliki kapasitas yang memadai disertai juga dengan sistem, manajemen, kepemimpinan dan perangkat yang tepat.

Secara keseluruhan, tingkat kapasitas respon kemanusiaan domestik di Indonesia tinggi; namun, masih ada berbagai peluang untuk meningkatkan kapasitas respon kemanusiaan di daerah setempat. Ada keinginan untuk berinvestasi dalam penguatan kapasitas secara keseluruhan, termasuk dengan meningkatkan jumlah staf dan meningkatkan keterampilan di dalam respon. Ada juga kebutuhan yang sangat penting untuk berinvestasi dalam kapasitas organisasi untuk menerima dan mengelola dana. Peningkatan kapasitas di tingkat sub-nasional – LSM dan pemerintah lokal.

LANGKAH PRAKTIS PENINGKATAN INVESTASI DALAM KAPASITAS

Perubahan transformatif dalam sistem kemanusiaan di Indonesia akan membutuhkan kapasitas lokal yang lebih besar untuk menyerap dana, menjadi tangguh, dan mengimplementasikan program yang berkualitas. Langkah-langkah di bawah ini dapat membantu mengarahkan sumber daya menuju penguatan kapasitas individu dan kelembagaan.

► **Memprioritaskan pengembangan kapasitas respons dan keterampilan berorganisasi.**

Penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kapasitas untuk merespon, tetapi juga kapasitas untuk membangun ketangguhan, mendorong pengurangan risiko bencana, dan meningkatkan percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

► **Menyertakan program pengembangan kapasitas dalam rencana pendanaan.**

Pengembangan kapasitas harus dianggap sebagai bagian penting dari respon kemanusiaan; pelaku kemanusiaan harus mampu menunjukkan bukti dampak dari investasi terhadap pengembangan kapasitas untuk menstimulasi donor mendanai pembangunan kapasitas.

► **Memasukkan kebutuhan pengembangan kapasitas dalam rencana operasi atau rencana pemulihan.**

Kemitraan dan kesepakatan proyek harus secara eksplisit menjelaskan komponen pengembangan kapasitas dan tercermin di dalam pelaksanaan

kegiatan dan aliran pendanaan.

- ▶ **Biarkan komunitas pembelajaran menentukan kebutuhan pelatihan.** Kegiatan peningkatan kapasitas harus didasarkan pada kebutuhan dan fokus pada apa yang perlu dipelajari peserta untuk merespon secara efektif. Materi pelatihan dan pendekatan yang dirancang dengan baik dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan antusiasme para peserta pelatihan.
- ▶ **Pastikan aksesibilitas untuk organisasi skala kecil dan terpencil.** Akses dapat ditingkatkan dengan memperluas klaster-klaster layanan yang ada atau membentuk klaster baru yang dikhususkan untuk pengembangan kapasitas. Ini dapat dipimpin oleh organisasi dengan pengalaman dan keahlian yang diakui dan melibatkan organisasi lokal skala kecil sebagai mitra setara dalam pembelajaran dan kolaborasi.
- ▶ **Mengadopsi pendekatan jangka panjang untuk membangun kapasitas pemerintah daerah.** Pendekatan penguatan untuk

pemerintah daerah harus menjadi prioritas untuk menstimulasi tata kelola dan praktik yang baik. Hal ini berarti tidak hanya melakukan investasi dalam kapasitas respon bencana yang berikutnya, tetapi juga berinvestasi pada manajemen risiko terintegrasi yang berkontribusi pada pencapaian target-target di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs).

- ▶ **Manfaatkan pelajaran-pelajaran dalam pengembangan kapasitas dari organisasi-organisasi nasional yang besar-besar.** Organisasi nasional skala besar seperti MDMC dapat membimbing organisasi yang skalanya lebih kecil melalui pelatihan antar sejawat (*peer-to-peer learning*), kerja magang, atau respon gabungan. Misalnya, selama operasi di Palu, Sulawesi Tengah, tim air, sanitasi, dan kebersihan (*Water, Sanitation and Hygiene* - WASH) dari organisasi lokal dan nasional belajar bersama tentang pengolahan air bersih di kamp WASH PMI.

SPOTLIGHT: PALANG MERAH INDONESIA

PMI telah melembagakan pengembangan kapasitas melalui berbagi pengetahuan dalam lokakarya dan pelatihan, pengembangan manajemen pengetahuan, dan berbagai sesi diskusi. PMI telah melaksanakan program dengan dukungan dari Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Komite Internasional Palang Merah, dan mitra gerakan lainnya seperti Palang Merah Amerika dan Palang Merah Jepang.

PMI juga memiliki platform e-learning yang dapat diakses oleh seluruh relawan PMI, staf dan manajemen PMI. Peningkatan kapasitas kepemimpinan merupakan prioritas yang tinggi, termasuk mendorong konsistensi organisasi dan kelembagaan di setiap level (komitmen dan integritas) serta penguatan kapasitas secara keseluruhan (di setiap level, sektor dan wilayah).

Prioritas penguatan kapasitas organisasi di PMI

1. **Kapasitas manajemen kelembagaan.** PMI berinvestasi dalam membangun kapasitas kelembagaan melalui pengenalan sistem perangkat lunak keuangan baru untuk digunakan di PMI Center, yaitu Microsoft

Dynamics 365, dan melatih 102 staf dalam penggunaannya. Hal ini mendukung pelaporan keuangan dan pada akhirnya juga akuntabilitas PMI dalam memberikan layanan kemanusiaan di Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan standar dan kepatuhan, 119 staf menerima pelatihan pencegahan penyelewengan dan korupsi di bawah Program *Red Ready*.

2. **Kapasitas pelibatan komunitas.** PMI telah memandang perlu dalam membangun sistem untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dalam semua layanan PMI, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga mekanisme umpan balik. PMI pusat telah mengembangkan pedoman akuntabilitas keterlibatan komunitas.
3. **Kapasitas kepemimpinan, teknis, dan inovasi.** PMI telah mengembangkan pendekatan multi-departemen yang koheren untuk menghasilkan data yang akurat tentang keseluruhan program dan operasinya. Hal ini memungkinkan PMI untuk merespon lebih efektif terhadap masalah kompleks yang terjadi di lapangan, melakukan kolaborasi, berbagi data berkualitas, dan memanfaatkan teknologi baru (termasuk

penilaian risiko geospasial). Pendekatan ini melibatkan semua tingkatan dalam PMI – kepemimpinan, staf teknis di kantor pusat PMI, dan staf PMI di ibukota provinsi dan kabupaten.

Meskipun sebagian besar kegiatan ini terutama ditujukan di tingkat markas pusat, mereka juga melibatkan staf dan relawan PMI. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung pemeliharaan kompetensi yang terkait dengan kesiapan data dan memastikan penggunaan data yang efektif di seluruh organisasi. Hal menjadi prioritas utama bagi PMI, yang menganggap kemudahan akses informasi sebagai bagian dari perencanaan tanggap darurat. PMI telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mendorong pengembangan sumber daya data bersama (untuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta) untuk menyediakan landasan umum bagi pengambilan keputusan.

Cara meningkatkan kapasitas untuk melayani komunitas yang terkena bencana

- ▶ Membuat **kebijakan dan peraturan** tentang kapasitas di dalam PMI yang berlaku bagi setiap individu, baik pimpinan, staf maupun relawan. Aturan tersebut dapat berupa peraturan organisasi, pedoman pelaksanaan, pedoman teknis atau prosedur operasi standar (*standard operating procedures* - SOP), atau keputusan yang terkait dengan mekanisme keuangan, pelaksanaan program berbasis masyarakat atau pelibatan komunitas.
- ▶ Membangun kapasitas **penguatan sistem** yang lebih inklusif dan efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan PMI, termasuk dukungan PMI di dalam layanan darurat bencana, krisis kesehatan dan konflik bersenjata, serta pendampingan perencanaan desa atau perkotaan yang tangguh bencana, pemberdayaan ketangguhan masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam semua layanan kemanusiaan. Memperkuat investasi kapasitas dan mendorong kebijakan di tingkat lokal
- ▶ **Memperkuat kapasitas personil PMI** dalam menjalankan misi kemanusiaan di masyarakat. Hal ini termasuk kapasitas dalam penanggulangan bencana (sebelum, selama dan sesudah), kapasitas layanan krisis kesehatan, donor darah, WASH, logistik dan komunikasi publik.

Penulis: Arifin Muh Hadi, Palang Merah Indonesia

Dukungan: Humanitarian Advisory Group dan Pujiono Centre

Penyunting: Campbell Aitken & Pujiono

Desain: Jean Watson

Penerjemah: Dio Fikri Aditama & Putu Hendra Wijaya



BRIEFING REFORMASI KEMANUSIAAN: PENDANAAN

Dari berbagai sumber dukungan pendanaan untuk aksi kemanusiaan di Indonesia, pendanaan Islami berpotensi besar untuk mendanai kerja kemanusiaan lokal di Indonesia. Namun, ada hambatan bagi organisasi lokal untuk mengaksesnya, dan perlu penguatan terkait akuntabilitas. Lumbung Dana (Pooled Funding) telah muncul sebagai alternatif ideal untuk membantu lembaga lokal dan kecil untuk memperoleh dana kemanusiaan.

Catatan singkat ini merefleksikan situasi dan peluang terkini untuk pendanaan kemanusiaan di Indonesia. Catatan singkat ini dikembangkan oleh Arif Nur Kholis dari [Muhammadiyah Disaster Management Center \(MDMC\)](#).

SUMBER PENDANAAN KEMANUSIAAN SAAT INI

Pendanaan untuk respons kemanusiaan di Indonesia saat ini datang melalui beberapa jalur utama.

Pendanaan Islami

Pendanaan sosial Islami didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosio-ekonomi, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Mobilisasi instrumen seperti zakat, infaq, wakaf, dan sadaqah (lihat kotak di bawah) membantu menyediakan pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk respons kemanusiaan. Pembentukan Forum Zakat (FOZ) pada tahun 1999 dianggap sebagai penanda perubahan progresif dalam penggunaan dana Islami untuk tujuan kemanusiaan. Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Zakat Nasional (BAZNAS), salah satu kerangka kerja pengaturan yang paling otoritatif dan komprehensif. Dalam satu dekade terakhir, di bawah pengawasan BAZNAS, banyak lembaga berbasis zakat telah berkembang menjadi lembaga kemanusiaan, seperti Dompot Dhuafa, Human Initiative, dan MDMC.

Pendanaan Islami di Indonesia berasal dari sumber dan pelaku negara dan non-negara, dan berperan penting dalam memungkinkan respons kemanusiaan. Namun, alokasinya belum mendukung aksi kemanusiaan secara optimal selama masih berfokus pada kebutuhan mendesak, pembangunan fisik, atau infrastruktur keagamaan. Perbaikan dalam akuntabilitas diperlukan untuk mengangkat pendanaan Islami sebagai pilihan ideal untuk pendanaan kemanusiaan.

Bantuan internasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan bantuan dan kerjasama internasional untuk wilayah geografis tertentu atau sektor tertentu. Hal ini dikelola berdasarkan fase atau putaran, dan dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan dana. MDMC dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menerima dukungan langsung dari negara-negara sahabat sejak 2007. Dana tersebut biasanya digunakan untuk tujuan non-darurat seperti pemodelan, pengujian, menyebarkan nilai-nilai universal, dan meningkatkan kapasitas manajemen dan kelembagaan.

Pendanaan internasional yang disediakan untuk tujuan tanggap darurat disertai akuntabilitas ekstra ketat mengikut standar kemanusiaan dan persyaratan donor. Lembaga donor mewajibkan calon penerima memiliki kecanggihan tertentu terkait birokrasi dan operasional; akibatnya sebagian besar dana masuk ke organisasi nasional, yang menjadi mitra dan penerima langsung dari para donor. Pola ini mengakar, sehingga memaksa OMS lokal yang kecil-kecil, yang tidak memenuhi persyaratan, menjadi subkontraktor berbasis-penugasan. Selain itu, banyak LSM internasional telah 'melokalisasi' diri mereka sendiri dengan membentuk entitas nasional sementara tetap mempertahankan struktur internasional dan/atau global mereka. Organisasi lainnya, Oxfam dan Plan misalnya, telah mengembangkan dan membimbing jaringan dan entitas kemanusiaan lokal seperti Jejaring Mitra Kemanusiaan dan Jaringan Karina.

Dukungan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penyaluran dana kemanusiaan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki manfaat akuntabilitas respons yang lebih sistematis, karena sistem pelacakan keuangan melekat pada pendekatan klaster. Namun, birokrasi yang kompleks dan berpusat pada PBB membuat pengambilan keputusan mungkin tidak inklusif; jangkauan kemitraan terbatas pada klaster PBB, sebagian besar tidak meliputi OMS lokal skala-kecil atau pelaku sektor non pemerintah di wilayah terdampak.

Pengumpulan dana

Sekarang semakin banyak instrumen pengumpulan dana seketika dan cepat (fundraising drive)

- dilakukan oleh organisasi amal untuk mengumpulkan dana dengan cepat untuk tujuan tanggap darurat. Mereka mampu secara efektif meningkatkan pendanaan kemanusiaan: fundraising drive yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk Muslim Rohingya mengumpulkan sekitar 1,6 juta dolar Amerika Serikat dalam 10 hari. Fundraising drive tidak terkait dengan zakat, dan secara langsung berkaitan dengan isu-isu tertentu.

Fundraising drive biasanya mencapai puncaknya selama keadaan darurat, tetapi berdurasi singkat. Mereka dapat mendorong kehebohan di media (media frenzy), yang dapat mengurangi akuntabilitas. Karena persaingan di ruang publik ini, mereka terkadang melibatkan publikasi yang tampak mengeksploitasi kesengsaraan masyarakat yang terdampak. Untuk meminimalkan dampak buruk dari fundraising drive ini, misalnya, MDMC menempatkan LAZISMU sebagai penanggung jawab penggalangan dana, sementara MDMC berfokus pada pendistribusian dana; upaya ini melindungi MDMC dari tekanan media dan memungkinkannya untuk mempertahankan integritasnya dalam pekerjaan kemanusiaan.

Sektor bisnis

Organisasi kemanusiaan seperti MDMC juga didukung sebagian oleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR). Banyak lembaga di Indonesia yang terampil dalam mendapatkan pendanaan CSR, dengan kreativitas yang tinggi di media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menarik pendanaan sektor swasta.

Prakarsa komunitas

Dampak COVID-19 dan penanggulangan terkait, telah memunculkan inisiatif antar komunitas di Indonesia. Ketika negara, pasar, dan OMS berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, komunitas mengorganisasi sistem-sistem untuk memberikan bantuan timbal balik lokal. Seiring berjalannya waktu, inisiatif ini tumbuh di di lingkup kota dan bahkan lebih luas lagi. Meskipun prakarsa ini umumnya bersifat ad hoc, ada kemungkinan bahwa beberapa akan tumbuh menjadi skema berkelanjutan untuk pendanaan kemanusiaan.

SPOTLIGHT PENDANAAN ISLAMI

Perkembangan kelembagaan menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era pendanaan Islami dalam aksi kemanusiaan. BAZNAS diberdayakan untuk menggunakan zakat demi tujuan kemanusiaan; namun, banyak yang harus dilakukan untuk mengklarifikasi fungsi gandanya sebagai regulator dari pemerintah di satu sisi, dan sebagai penyalur serta pengelola zakat.

Ada dua jenis lembaga zakat non-pemerintah di Indonesia. Organisasi berbasis massa seperti MDMC, NU, dan LAZISNU, serta Hidayatullah dengan Baitul Maal Hidayatullah. Organisasi berbasis non-massa adalah Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan ACT. Organisasi berbasis massa dianggap memiliki dukungan masyarakat dan kekuatan politik yang lebih kuat dibandingkan organisasi berbasis non-massa.

Instrumen pendanaan Islami

Zakat adalah pajak atas kekayaan sekaligus instrumen distribusi kekayaan, dianggap sebagai penyaluran hubungan antara individu dan kepentingan umum (maslaha).

Setiap tahun, umat Islam diwajibkan untuk menyumbangkan 2,5% dari total kumulatif kekayaan satu tahun kepada orang kurang mampu dalam bentuk zakat. Karena bersifat wajib, zakat merupakan sumber pendanaan Islam yang terbesar. Namun, zakat hanya dapat digunakan untuk umat Islam, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal. Dalam lima tahun terakhir terjadi perubahan makna zakat secara progresif. Beberapa lembaga Islam yang sebelumnya menerapkan kebijakan zakat yang ketat mulai mendefinisikan semua korban bencana sebagai 'kurang mampu' dan dengan demikian digolongkan sebagai penerima bantuan zakat yang potensial, dan dana zakat disimpan dan dikeluarkan selama keadaan darurat. Begitu pula dengan zakat Idul Fitri/fitrah yang dikumpulkan sebelum shalat Idul Fitri, yang dulu dibagikan langsung setelahnya, sekarang diperbolehkan untuk digunakan sepanjang tahun.

Infak (Infaq) berarti melepaskan sebagian harta benda atau penghasilan seseorang demi kepentingan umum yang diperintahkan oleh Islam, seperti membantu anak yatim, orang kurang mampu, dan orang yang terkena bencana.

Sifat hukumnya adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang, tetapi jika telah dilakukan oleh satu atau beberapa orang maka kewajiban untuk kelompok tersebut dianggap telah terpenuhi; jika tidak ada yang memberikan bantuan, maka seluruh kelompok dianggap bersalah. Ummah (masyarakat) diberi kebebasan untuk menentukan waktu dan jumlah harta yang dikeluarkan..

Wakaf (Waqf) adalah harta benda yang disumbangkan untuk dikelola oleh suatu badan/lembaga demi kebermanfaatannya mencapai kebaikan yang lebih besar. Wakaf adalah sumbangan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, atau amal, paling sering digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau lembaga keagamaan. Mengingat sifatnya yang komunitarian, wakaf sering digunakan untuk mendanai proyek dan layanan sosial; secara tradisional, dapat berupa pemberian tanah untuk kepentingan umum. Saat ini, pemberian wakaf dalam bentuk dana untuk tujuan kemanusiaan, pemberdayaan, dan pendidikan juga semakin dianjurkan. Salah satu contoh penggunaan dana sumbangan baru-baru ini adalah kontribusi Badan Pengelola Keuangan Haji untuk upaya-upaya kemanusiaan, seperti penyediaan dana dan ambulans untuk tanggap bencana di Mamuju (Sulawesi Barat). Sampai saat ini, lembaga-lembaga kemanusiaan belum memanfaatkan dana wakaf, sehingga banyak lembaga wakaf yang menitipkan dananya kepada lembaga zakat untuk digunakan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.

Sedekah (Sadaqah) adalah harta yang dihibahkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatannya sesama.

Sedekah adalah amal sukarela yang diberikan secara ad-hoc - bayangkan seperti memasukkan koin ke dalam kotak sumbangan amal. Karena sifatnya yang tidak teratur, sedekah seringkali sulit untuk dihitung, karena bervariasi dari individu ke individu dan tergantung pada pendapatan dan kedermawanan mereka.

Evolusi dalam pendanaan Islami dapat mengaktifkan potensi besar dana-dana publik ini untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, terutama ketika mengintegrasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik: partisipasi, supremasi hukum, konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap. MDMC bertujuan untuk membuat pendanaan Islam lebih akuntabel dengan mematuhi standar internasional dan kode etik kemanusiaan yang ada. Diskusi dengan pengguna dana harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan, dan harus melibatkan ulama Islam progresif yang dapat menerima logika-logika baru aksi kemanusiaan.

MODEL UNTUK MEKANISME KOLABORATIF

- ▶ **Konsorsium** - Lembaga-lembaga dengan karakteristik, filosofi, dan tujuan yang serupa dapat membentuk konsorsium untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi. Misalnya, anggota konsorsium dapat melakukan pengkajian kebutuhan bersama, atau menyiapkan proposal dan melaksanakan proyek bersama, sementara setiap anggota tetap bebas untuk melakukan sebagian besar kegiatan mereka sendiri secara mandiri. Humanitarian Forum Indonesia adalah contoh yang baik dari konsorsium tersebut, seperti halnya JMK, sebuah konsorsium yang terdiri dari 23 organisasi lokal yang dilatih dan diberdayakan oleh OXFAM. Contoh lainnya adalah proyek Kepemimpinan Lokal dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan dari Bencana (Locally Led Disaster Preparedness and Protection), diimplementasikan oleh Adventist Development & Relief Agency (ADRA) dan Plan International. Setelah menerima dana dari Direktorat Jenderal Operasi Perlindungan Sipil dan Urusan Kemanusiaan Eropa, ADRA dan Plan membentuk konsorsium fungsional di Indonesia bersama MDMC, REdR Indonesia, dan Pujiono Centre, dengan pembagian tugas yang jelas antar anggota. Bentuk pendanaan konsorsium memiliki keuntungan dimana sekretariat menjaga akuntabilitas agar lembaga anggota dapat berfokus pada operasi.
- ▶ **Lambung Dana (Pooled Fund)** merupakan bentuk kelembagaan yang ideal bagi para pelaku kemanusiaan lokal, yang cenderung terpinggirkan karena skalanya terlalu kecil, terlalu lokal, atau dianggap tidak mampu menyerap dan melaporkan dana kemanusiaan.

Ketika mekanisme pooled funding dilengkapi dengan kebijakan, struktur, dan sistem yang memadai, mekanisme ini dapat bertindak sebagai perantara antara lembaga donor dan pelaku kemanusiaan lokal dengan menerapkan persyaratan-persyaratan yang tidak serumit ketentuan yang diterapkan oleh lembaga donor. Misalnya, beberapa OMS/LSM dapat membentuk panitia untuk membuat dan mengajukan proposal bersama, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan operasional. Setelah mendapatkan dana, panitia ini mengalokasikan dana kepada lembaga anggota yang memenuhi persyaratan yang tidak terlalu ketat, sementara itu komite ini turut mendukung dengan upaya pemantauan dan pelaporan.

- ▶ **Model pendanaan START** - model ini memungkinkan lembaga donor dalam memposisikan terlebih dahulu pendanaan untuk respons kemanusiaan yang cepat. Adanya pengaturan kolektif yang telah ditetapkan sebelumnya bersama beberapa organisasi yang lebih besar, juga berarti adanya pemantauan dan regulasi yang lebih mudah, jika dibandingkan dengan ketika berurusan bersama banyak OMS berskala kecil. Namun, skema semacam ini membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat, dan kepercayaan para anggota terhadap manajemen ini harus sangat tinggi.

Penulis: Arif Nur Kholis, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

Dukungan: Humanitarian Advisory Group dan Pujiono Centre

Penyunting: Campbell Aitken & Pujiono

Desain: Jean Watson

Penerjemah: Dio Fikri Aditama & Putu Hendra Wijaya